



REVIU RENSTRA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

0

KATA PENGANTAR

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama lima tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Dalam Reviu Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ini terdapat 9 (Sembilan) Program, 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub-Kegiatan.

Harapan kami semoga Reviu Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2021 - 2026 dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 mendatang.

Mojokerto, Desember 2023
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19731120 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN

Jl. Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 390211 Fax. (0321) 390210
Website : <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.4 /2278 / 416-104 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

6. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Renjana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026.

KESATU :

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

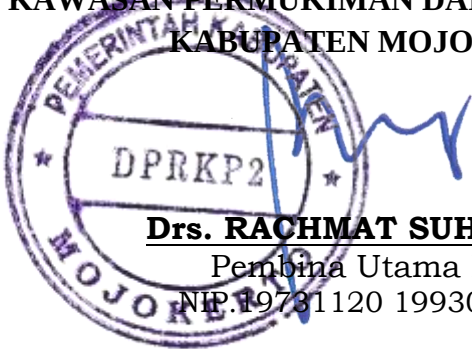
- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
3.2	Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- KEDUA : URAIAN Perubahan Renstra Sebagaimana Dimaksud Pada diktum kesatu, tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dibuat Setiap Akhir Tahun Anggaran Dalam Bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal Desember 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19731120 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
BAGAN STRUKTUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	10
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEWENANGAN	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	26
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	26
3.3.1 A.Faktor Penghambat aatau Kelemahan	27
3.3.2 B Faktor Pendorong/Kekuatan	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.	28
3.5 Penentuan ISU-ISU Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	29
4.2 Sasaran	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
5.1 Strategi dan Kebijakan	31
5.2 Arah Kebijakan	31
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII	75
PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah, serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi yang selaras sangat menuntut adanya penataan ulang (Perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto khususnya Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan kedepan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan terakomodasinya berbagai variable pembangunan yang ada diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika perlu menyusun suatu rumusan program dan kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang sumber daya (Alam. Manusia, dll) dan memperhatikan segala hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Sebab dampak era keterbukaan (global) pada saat setelah diberlakukannya otonomi daerah akan membawa permasalahan yang serius terutama bagi daerah/Kabupaten yang tidak siap menghadapinya. Khususnya pada bidang perumahan, permukiman dan perhubungan menjadi lebih kompleks, dimana pertumbuhan dan kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman serta dinamika pergerakan manusia, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kendaraan maupun barang akan lebih cepat, massal dan butuh keterpaduan yang tinggi antar sub sistem. Sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang baik, yaitu :

Pengembangan sistem bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan :

1. Pengembangan kawasan kumuh
2. Pengembangan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan standart pelayanan minimal (SPM)

3. Pengembangan sistem bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
4. Pengembangan sistem bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
5. Pengembangan sistem registrasi, penegakan hukum, operasional manajemen rekayasa lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginya ketergantungan kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan adanya persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta menjabarkan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Ranwal Renstra ini merupakan langkah awal pembangunan tahun 2021-2026 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (10) : “Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rerncana Prembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mempunyai arah dan langkah-langkah yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjawab permasalahan dan tuntutan yang melingkupinya agar didapatkan suatu perbaikan keadaan (hasil pembangunan) sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 kedalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD
3. Menyediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
4. Melakukan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renstra ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPRKP2 sebagai satuan kerja pemerintah daerah dibidang perumahan, permukiman dan perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Ranwal Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan

kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPRKP2 KABUPATEN MOJOKERTO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Perparkiran;
 - 3) Seksi Terminal.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

V. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perpustakaan serta terminal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- d. Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;

- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidangprasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas serta keselamatan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

- a) Golongan IV : 5 orang
- b) Golongan III : 31 orang
- c) Golongan II : 38 orang
- d) Golongan I : 3 orang

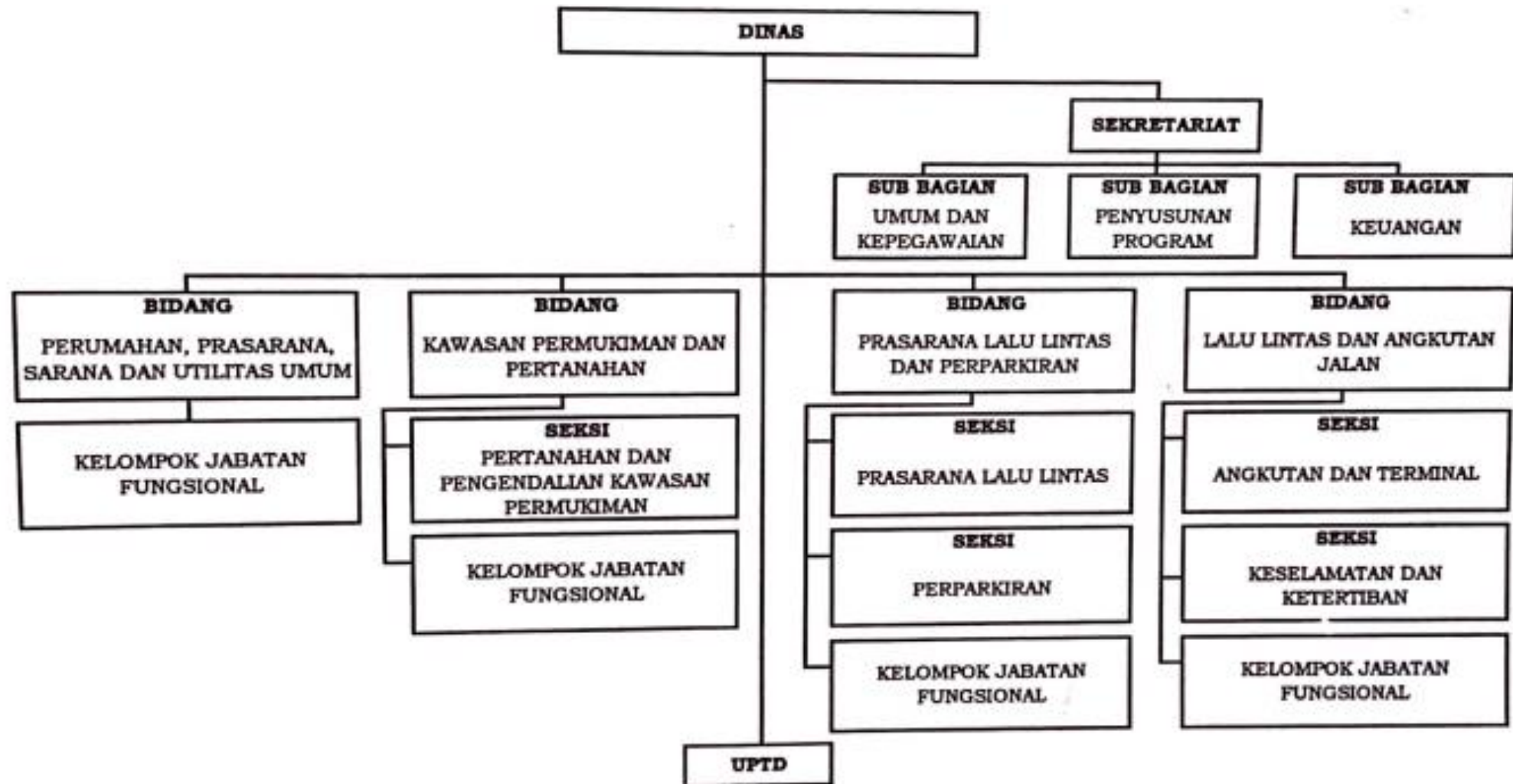
Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

- a) Strata 2 (S2) : 4 orang
- b) Strata 1 (S1) : 28 orang
- c) Diploma 4 (D4) : 1 orang
- d) Sekolah Menengah Atas (SMA) : 39 orang
- e) Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 3 orang
- f) Sekolah Dasar (SD) : 2 orang

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

1. Aset berupa tanah sarana umum terminal 6 lokasi
2. Kendaraan dinas roda empat 15 unit dan sepeda motor 20 unit
3. Alat-alat bengkel 6 unit dan alat ukur sejumlah 11 unit
4. Alat-alat kantor 77 unit, alat rumah tangga 82 unit, alat meubelair 94 unit, alat komputer 80 unit.
5. Alat-alat studio 16 unit dan komunikasi sejumlah 5 unit berupa amplifier/mic/corong
6. Gedung kantor 3 lokasi untuk sarana transportasi (terminal) termasuk UPT Terminal dan UPT Pegujian Kendaraan Bermotor, gedung dan bangunan lainnya 7.
7. Bangunan Monumen/rambu sejumlah 2590 unit berupa alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)
8. Instalasi Listrik, Telepon Fax 1 unit dan Telepon 1 unit

BAGAN STRUKTUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Adapun sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.2 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Skretaris	-	-	-
3.	Kepala Bidang	4	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Kepala Seksi	8	1	9
6.	Kepala UPT	1	-	1
7.	Kepala TU UPT PKB	-	-	-
8.	Staff	57	3	60
	JUMLAH	77	4	77

Tabel 2.3 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	4	-	4
3.	S – 1	25	3	28
4.	D – IV	1	-	1
5.	SLTA	39	1	40
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	2	-	2
	JUMLAH	77	4	77

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel TC - 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 2016-2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	200.000.000,00	200.000.000,00		228.000.000,00	225.000.000,00					117.554.354,00					
	Penyediaan Jasa Pem.& Perijinan Kend.Dinas / Ops.	10.000.000,00	19.100.000,00		25.170.000,00	22.653.000,00					9.986.200,00					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	33.250.000,00		37.554.000,00	34.000.000,00					33.753.420,00					
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	550.000.000,00	550.000.000,00		600.000.000,00	504.512.500,00					495.135.200,00					
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	29.375.000,00		155.000.000,00	67.500.000,00					64.790.000,00					
	Penyediaan Makanan & Minuman	33.000.000,00	31.350.000,00		33.000.000,00	24.848.000,00					24.844.000,00					

	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar & Dalam Daerah	85.000.00 0,00	80.750.00 0,00		60.000.0 00,00	43.696.68 8,00					42.743.37 6,00					
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	37.440.00 0,00	37.440.00 0,00		40.213.4 40,00	40.213.44 0,00					37.440.00 0,00					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-			38.850.0 00,00	32.100.00 0,00					17.100.00 0,00					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20.000.00 0,00	19.955.00 0,00		20.000.0 00,00	18.000.00 0,00					17.998.80 0,00					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend.Dinas Ops.	55.000.00 0,00	20.000.00 0,00		55.000.0 00,00	39.992.00 0,00					39.989.13 2,00					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.00 0,00	55.000.00 0,00		30.000.0 00,00	25.000.00 0,00					25.000.00 0,00					
	Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan		30.000.00 0,00		75.000.0 00,00	-					-					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara															

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	61.960.000,00			40.000.000,00											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan															
	Penyusunan Rencana Tahunan Dan Laporan Kinerja SKPD	25.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	9.000.000,00					8.465.000,00					
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan															
	Penganugrahan Duta Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	25.000.000,00	85.000.000,00		76.500.000,00	6.549.600,00					6.549.600,00					
	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	550.000.000,00	30.000.000,00		692.454.000,00	697.454.000,00					695.853.991,00					
	Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	50.000.000,00	50.000.000,00		52.200.000,00	52.200.000,00					51.153.039,00					
	Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Forum LLAJ	50.000.000,00	70.000.000,00		63.000.000,00	26.350.000,00					26.350.000,00					
	Duta Tertib Lalu Lintas	25.000.000,00	30.000.000,00		27.000.000,00	9.799.900,00					9.799.900,00					

	Pengamanan Insidentil	50.000.00 0,00	60.000.0 00,00		79.200.0 00,00	179.200.0 00,00					177.365.0 00,00					
	Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	25.000.00 0,00	30.000.0 00,00		27.000.0 00,00	10.000.00 0,00					9.350.000 ,00					
	Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.00 0,00	50.000.0 00,00		67.500.0 00,00	67.500.00 0,00					66.654.80 0,00					
	Pengadaan Sistem Aplikasi PKB				265.500. 000,00											
	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah	300.000.0 00,00	196.200. 000,00		174.000. 000,00	200.000.0 00,00					195.684.0 00,00					
	Program Pengembangan Perumahan															
	BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya				45.000.0 00,00	48.282.50 0,00					47.545.21 7,00					
	BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	187.880.0 00,00	187.880. 000,00		90.000.0 00,00											

Penunjang DAK Bidang Perumahan (APBD)		54.233.000,00		148.000.000,00	129.407.500,00					122.601.668,00					
Penunjang DAK Bidang Perumahan (APBN)		73.187.000,00		137.290.000,00	120.044.000,00					120.044.000,00					
Sinkronisasi Data Kawasan Permukiman				45.000.000,00											
BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi				22.500.000,00											
Penataan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman				90.000.000,00											
Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman				90.000.000,00	589.200,00					589.200,00					
Program Lingkungan Sehat Perumahan															
Penunjang Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Pondok Pesantren				82.755.000,00											
Penunjang Kegiatan TIM Verifikasi PSU Perumahan				137.790.000,00	50.000.000,00					40.050.000,00					

Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan				152.325.000,00	200.000.000,00					158.261.000,00					
BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)				67.500.000,00	31.591.050,00					31.591.050,00					
BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					-										
Penyusunan raperda Makam					100.000.000,00										
Pemeliharaan Makam Mantan Bupati Mojokerto					50.000.000,00					48.720.000,00					
Program Air Bersih Sanitasi															
Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		910.000.000,00		1.225.000.000,00	490.000.000,00					490.000.000,00					
BOP Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		115.000.000,00		90.000.000,00	70.000.000,00					66.009.772,00					
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas															

	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan		50.000.000,00		27.000.000,00	150.000.000,00					150.000.000,00					
	Pemeliharaan Pagar UPT. Terminal Mojosari		150.000.000,00													
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	200.000.000,00	100.000.000,00		90.000.000,00	150.000.000,00					149.261.400,00					
	Pengadaan Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan	600.000.000,00	250.000.000,00		2.090.000.000,00	450.000.000,00					446.301.450,00					
	Pengadaan Rambu APILL				500.613.250,00											
	Pengadaan Flasher dan Warning light		176.000.000,00		90.000.000,00	196.000.000,00					194.854.950,00					
	Pengadan Kartu Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor				500000000											
	JUMLAH				8.942.914.690,00	4.496.262.128,00					4.264.168.219,00					

Kegiatan 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					96 2.423.628										
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					225.000.000					117.554.354,00					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					22.653.000					9.986.200,00					
	Penyediaan alat tulis kantor					34.000.000					33.753.420,00					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					504.512.500					495.135.200,00					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					67.500.000					64.790.000,00					
	Penyediaan makanan dan minuman					24.848.000					24.844.000,00					
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah					43.696.688					42.743.376,00					

	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja					40.213.440					37.440.00 0,00					
						115.092.000										
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					32.100.000					17.100.00 0,00					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					18.000.000					17.998.80 0,00					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					39.992.000					39.989.13 2,00					
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					25.000.000					25.000.00 0,00					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					9.000.000					8.465.00 0,00					
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD					9.000.000					8.465.000 ,00					
	Program Pengembangan Perumahan					249.451.500										

Penunjang DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman (APBN)					120.044.000					120.044.000,00					
Penunjang DAK REGULER Bidang Perumahan dan Permukiman					129.407.500					122.601.668,00					
Program Prasarana dan Sarana Lalu Lintas					1.193.454.000										
Pengadaan Flasher dan Warning Light					196.000.000					194.854.950,00					
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas					150.000.000					149.261.400,00					
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran					697.454.000					695.853.991,00					
Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan					150.000.000					150.000.000,00					
Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					551.599.500										
Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ					26.350.000					26.350.000,00					
Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas					6.549.600					6.549.600,00					

(Wahana Tata Nugraha)																
Duta Tertib Lalu Lintas					9.799.900					9.799.900,00						
Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan					10.000.000					9.350.000,00						
Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru					52.200.000					51.153.039,00						
Pengamanan insidentil					179.200.000					177.365.000,00						
Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor					67.500.000					66.654.800,00						
Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah					200.000.000					195.684.000,00						
Program Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum					250.000.000											
BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya					48.282.500					47.545.217,00						

Penunjang Kegiatan Tim Verifikasi PSU Perumahan					50.000.000					40.050.000,00					
Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan					200.000.000					158.261.000,00					
Program Permukiman dan Pertanahan					659.196.450										
BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah					-					-					
Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman					589.200					589.200,00					
BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)					70.000.000					66.009.772,00					
BOP Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)					31.591.050					31.591.050,00					
Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan					-					-					
BOP Penyusunan Perda Pemakaman					17.016.200					17.016.200,00					
BOP Penerbitan Rekomendasi Izin					-					-					

	Permukiman dan Pertanahan															
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)					490.000.000					490.000.000,00					
	Pemeliharaan Makam Bupati					50.000.000					48.720.000,00					
	Program Prasarana Sarana Lalu Lintas					457.762.550										
	DAK Fisik Bidang Keselamatan Jalan (PENUGASAN)					-					-					
	Penunjang DAK PENUGASAN Bidang Keselamatan Jalan					7.762.550					7.762.500,00					
	Pengadaan/Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan					450.000.000					446.301.450,00					
	TOTAL					4.496.262.128,00					4.264.168.219,00					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah dibentuknya Perangkat Daerah Gabungan dimana urusan Perumahan dan Permukiman itu mengampu 3 Kementrian, hal tersebut sangat membebani pada perangkat daerah yang dibentuk. Untuk urusan Perumahan dan Permukiman dengan SDM dan Sarana Prasarana yang kurang sehingga dalam pelaksanaan lapangan masih kurang efektif dan efisien, beberapa program usulan sesuai dengan permintaan data juga masih belum bisa mendapatkan anggaran sehingga pemenuhan data sebagai sistem penilaian intern pemerintah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Peluang yang dapat mengembangkan urusan Perumahan dan Permukiman adalah di telaah hasil RTRW memberikan peluang untuk pengembangan Perumahan dan Permukiman itu sebagai salah satu dasar Urusan Perumahan dan Permukiman untuk megembangkan Perangkat Daerah di Lima Tahun Mendatang.

Tantangan pada urusan Perhubungan makin berkurangnya Mobil Kendaraan Umum dan mengakibatkan fungsi terminal berkurang, dan juga adanya sistem ojek online (Gojek, Grab dll) sehingga membuat peminat angkutan umum semakin berkurang, serta adanya kredit motor yang mudah membuat masyarakat cenderung memiliki banyak kendaraan pribadi,

Peluang urusan Perhubungan adalah dengan memberdayakan fungsi terminal dialihfungsikan sebagai pasar contoh terminal brangkal dan terminal lespadangan sehingga menambah kegiatan ekonomi masyarakat lainnya dan memberfungsikan urusan perhubungan ke pusat-pusat kegiatan masyarakat untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima Tahun mendatang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEWENANGAN

Banyak hal yang terkait dalam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, sehingga timbul beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

1. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
3. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.
4. Jumlah Rumah Layak Huni yang masih tinggi
5. Penanganan SPM belum Maksimal dikarenakan tidak ada program pemerintah terkait Relokasi Program
6. Penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha belum optimal

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan Visi dan Misinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) terkait visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia

Misi : Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan dijabarkan dalam rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan di tindak lanjuti dengan Rencana Strategis (Rancangan Perubahan Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan akan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang

bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari faktor faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah

Misi Bupati tersebut senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3.1 A.Faktor Penghambat aatau Kelemahan

1. Belum optimalnya kinerja aparat sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional.
2. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
6. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
7. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (*reward and punishment*).
8. Masih kurang mantapnya kinerja lembaga akibat tumpang tindihnya tupoksi antar instansi.
9. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
10. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
11. Masih kurangnya jumlah staf masing-masing bidang.
12. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
13. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.

3.3.2 B Faktor Pendorong/Kekuatan

1. Adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016
2. Adanya dukungan sumber pendanaan yang berasal dari APBD
3. Menjadi Perangkat Daerah penghasil (PAD)

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Dengan adanya (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah membantu DPRKP 2 dalam memetakan pengembangan kawasan Permukiman dan peningkatan Sanitasi Air juga meminimkan Luas Kawasan Kumuh Terkait hal tersebut Kami belum bisa menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah karena Perangkat Daerah yang mengampu kegiatan tersebut baru dibentuk Tahun 2017.

3.5 Penentuan ISU-ISU Strategis

1. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
2. Semakin berkembangnya industri properti.
3. Kawasan bebas kumuh/ permukiman kumuh masih belum optimal dari penataan dan penanganannya
4. Penanganan rehabilitasi rumah korban bencana belum maksimal dengan penetapan SK yang ditentukan
5. Kondisi penyediaan Sarana Prasarana Penunjang jalan seperti lokasi parkir yang masih belum tersedia dan belum mumpuni
6. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
7. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
8. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
9. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah GerbangKertasusila dan dekat dengan ibukota propinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran 2 RPJMD yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Reviu Renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Perubahan Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan Misi ke 4 Bupati menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi " Terwujudnya pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan", maka ditetapkan tujuan :
 - a. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni
 - b. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Lingkup Perhubungan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka pada Reviu Renstra Perubahan di Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

- 1. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan
- 2. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh
- 3. Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infastrutur permukiman, pedesaan serta infrastruktur ekonomi strategis

5.2 Arah Kebijakan

- 1. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- 2. Penataan kawasan kumuh
- 3. Pengembangan System sarana dan prasarana LLAJ
- 4. Pengembangan System pengembangan teknologi LLAJ

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Insfrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia			
MISI : Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman layak Huni	1. Meningkatnya kualitas insfrastruktur perumahan dan permukiman	Peningkatan Peremajaan permukiman Kumuh dan PSU Perumahan secara optimal	Mempercepat dan meningkatkan kualitas berdasarkan kajian teknis yang terukur dan terupdate pada sub kegiatan/kegiatan yang tertuang pada isu strategis
Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Lingkup Perhubungan	2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan sesuai ketentuan yang berlaku, Pemantauan Kinerja Jalan	Membuat Kajian Terkait dengan kinerja jalan urusan perhubungan

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Perubungan Kabupaten Mojokerto

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN KE -					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Perumahan Berkondisi Baik	33%	35,54%	36,43%	36,74%	36,84%	36,94%
		Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	3,18%	6,28%	9,64%	19,82%	23%	26,18%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak	60%	60,20%	60,50%	60,7%	60,9%	71%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN KE -N					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 (BB)	77,7 (BB)	78,6(BB)	79,5 (BB)	80,4 (BB)	81,3 (BB)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	82%	85%	90,54%	91%	91,5%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	70 (Sedang)	71 (Sedang)	72 (Sedang)	73 (Sedang)	76 (Sedang)	75 (Sedang)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati terpilih Perangkat Daerah didukung Program dan Kegiatan serta Pendanaan nya sehingga Visi Misi Bupati terpilih bisa tercapai, adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Pendannan seperti pada Tabel TC -27

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase pengembangan perumahan layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhab}}{\text{Jumlah Rumah Terdampak Bencana}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Luas penanganan kumuh sampai Tahun ke-N}}{\text{Jumlah Luas kumuh Sesuai SK Kumuh}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	Persentase peningkatan kualitas PSU	$\frac{\text{Luasan PSU Perumahan Kondisi Baik} + \text{Jumlah PSU Perumahan yang sudah dipelihara}}{\text{Total Luas PSU Perumahan yang Sudah di serahkan ke Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	Persentase Redistribusi dan ganti rugi tanah yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah penerima yg mendapat sertifikat Redistribusi Tanah}}{\text{Jumlah pemohon yg mengajukan pengelolaan redistribusi tanah}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan	Jumlah mediasi perkara yang ditangani	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	$\frac{\text{Jumlah sarana jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan sarpras yang layak}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

TABEL 6.1
(Tabel T-C 27 dalam Lampiran Kepmendagri 050 Tahun 2020)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Thn. 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program dan Kegiatan	Program/Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun Ke-1 (2022)		Tahun Ke-2 (2023)		Tahun Ke-3 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani			2,52% Lokasi Kumuh	6,28% Lokasi Kumuh		9,64% Lokasi Kumuh		19,82 % Lokasi Kumuh		23% Lokasi Kumuh		26,18% Lokasi Kumuh		26,18 % Lokasi Kumuh		DPRKP 2	Kab. Mojokerto

Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Lingkup Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan Transportasi	Persentase Sarana Prasarana jalan dan Angkutan Umum Layak			0.60	60,20%		60,50%		60,70%		60,90%		71%		71%		DPRKP 2	Kab. Mojokerto
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,8 (BB)	77,7 (BB)	11,670,452,477	78,6 (BB)	12,487,384,150	79,5 (BB)	13,361,501,041	80,4 (A)	14,296,806,114	81,3 (A)	15,297,582,542	81,3 (A)			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	100%	100%	190,000,000	100%	203,300,000	100%	217,531,000	100%	232,758,170	100%	249,051,242	100%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	7,500,000	7 Dokumen	7,500,000	7 Dokumen	7,500,000	7 Dokumen	7,500,000	7 Dokumen			

			Rincian: Penyusun an Dokumen Renstra,R enja,LRA, CALK, dsb															
			Koordinas i dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoordinasi dan dapat dikendalikan pelaksanaann ya	21 Keg	21 Keg	180,0 00,00 0	21 Keg	192,60 0,000	21 Keg	206, 082, 000	21 Keg	220,507, 740	21 Keg	235,94 3,282	21 Keg		
			Rincian: Kegiatan penyusun an laporan IKM, SOP															
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokume n	5,000, 000	7 Dokum en	5,350,0 00	7 Dokum en	5,72 4,50 0	7 Dokum en	6,125,21 5	7 Dokumen	6,553,9 80	7 Doku men		

			Rincian : Penyusun an Rencana Tahunan Laporan Kinerja SKPD																
			Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangan nya	100%	100%	10,43 3,381, 437	100%	11,163, 718,13 8	100%	11,9 45,1 78,4 07	100%	12,781,3 40,896	100%	13,676, 034,75 8	100%			
			Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangan nya	77 ASN	77 ASN	10,23 3,381, 437	77 ASN	10,949, 718,13 8	77 ASN	11,7 16,1 98,4 07	77 ASN	12,536,3 32,296	77 ASN	13,413, 875,55 6	77 ASN			
			Penyediaa n Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	200,0 00,00 0	12 bulan	214,00 0,000	12 bulan	228, 980, 000	12 bulan	245,008, 600	12 bulan	262,15 9,202	12 bulan			
			Rincian : Intensifik asi dan Ekstensifi kasi Sumber- Sumber																

			Pendapat an Daerah															
			Penyediaa n Jasa Tenaga Kerja															
			Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	100%	100%	388,0 00,00 0	100%	415,16 0,000	100%	444, 221, 200	100%	475,316, 684	100%	508,58 8,852	100%		
			Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, internet, listrik terbayar per bulan	12 bulan	12 bulan	208,0 00,00 0	12 bulan	222,56 0,000	12 bulan	238, 139, 200	12 bulan	254,808, 944	12 bulan	272,64 5,570	12 bulan		
			Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	180,0 00,00 0	12 bulan	192,60 0,000	12 bulan	206, 082, 000	12 bulan	220,507, 740	12 bulan	235,94 3,282	12 bulan		
			logistik Rincian: Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor															

			Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100%	100%	441,5 00,00 0	100%	472,40 5,000	100%	505, 473, 350	100%	540,856, 485	100%	578,71 6,438	100%			
			Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	jumlah waktu tersedianya jasa peralatan dan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	81,50 0,000	12 bulan	87,205, 000	12 bulan	93,3 09,3 50	12 bulan	99,841,0 05	12 bulan	106,82 9,875	12 bulan			
			· Ketatau sahaan dan kepegawa ian DPRKP2 (7-13) · Pengada an Perlengka pan Gedung Kantor																
					12 bulan	12 bulan								12 bulan					

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan			250,000,000	12 bulan	267,500,000	12 bulan	286,225,000	12 bulan	306,260,750		327,699,003	12 bulan			
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	30,000,000	25 jenis	32,100,000	25 jenis	34,347,000	25 jenis	36,751,290	25 jenis	39,323,880	25 jenis			
			Rincian : Penyediaan Alat Tulis Kantor																
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	1200 Dos	1200 Dos	25,000,000	1200 Dos	26,750,000	1200 Dos	28,622,500	1200 Dos	30,626,075	1200 Dos	32,769,900	1200 Dos			
			Rincian: Penyediaan makanan dan minuman																
					100 oh	100 oh		100 oh		100 oh		100 oh		100 oh		100 oh			

			Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi ke luar dan dalam daerah yang terbiayai			55,00 0,000		58,850, 000		62,9 69,5 00		67,377,3 65		72,093, 781			
			Rincian: Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah															
			Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	90,00 0,000	100%	96,300, 000	100%	103, 041, 000	100%	110,253, 870	100%	117,97 1,641	100%		
			Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Kendaraan dinas	3 Kendara an dinas	90,00 0,000	3 Kendar aan dinas	96,300, 000	3 Kendar aan dinas	103, 041, 000	3 Kendar aan dinas	110,253, 870	3 Kendaraa n dinas	117,97 1,641	3 Kenda raan dinas		

			Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah terpelihara	100%	100%	112,5 71,04 0	100%	120,45 1,013	100%	128, 882, 584	100%	137,904, 365	100%	147,55 7,670	100%			
			Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara	4 unit	4 unit	67,75 0,000	4 unit	72,492, 500	4 unit	77,5 66,9 75	4 unit	82,996,6 63	4 unit	88,806, 430	4 unit			
			· Rincian: Penyediaa n Jasa Pemelihar aan dan Perizinan Kendaraa n																

			Dinas/Operasional															
			· Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional															
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	3 Gedung	3 Gedung	18,000,000	3 Gedung	19,260,000	3 Gedung	20,608,200	3 Gedung	22,050,774	3 Gedung	23,594,328	3 Gedung		
			Rincian: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor															
					30 kali	30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			26,821,040		28,698,513		30,707,409		32,856,927		35,156,912			
			Rincian: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor															
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	15,000,000	100%	16,050,000	100%	17,173,500	100%	18,375,645	100%	19,661,940	100%		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan sosialisasi	25 kali	25 kali	15,000,000	25 kali	16,050,000	25 kali	17,173,500	25 kali	18,375,645	25 kali	19,661,940	25 kali		

				Perda Permakaman															
			Rincian:P enyusuna n Peraturan daerah tentang penyeleng garaan permaka man																
			PROGRA M PENGEM BANGAN PERUMA HAN	Persentase Pengembang an Perumahan Layak Huni	100%	100%	525,0 00,00 0	100%	561,75 0,000	100%	601, 072, 500	100%	643,147, 575	100%	688,16 7,905	100%			
				Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100%	100%	75,00 0,000	100%	80,250, 000	100%	85,8 67,5 00	100%	91,878,2 25	100%	98,309, 701	100%			

			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana														
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah data yang diperoleh dalam Update kegiatan perumahan	1 laporan	1 laporan	75,000,000	1 laporan	80,250,000	1 laporan	85,867,500	1 laporan	91,878,225	1 laporan	98,309,701	1 laporan		
			Rincian: Updating Data Perumahan (BackLock)															

			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi terlaksana	100%	100%	100,000,000	100%	107,000,000	100%	114,490,000	100%	122,504,300	100%	131,079,601	100%			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang terhabilitasi	3 unit	3 unit	100,000,000	100%	107,000,000	100%	114,490,000	100%	122,504,300	100%	131,079,601	100%			
			Rincian: Rehabilitasi rumah																

			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	100%	300,000,000	100%	321,000,000	100%	343,470,000	100%	367,512,900	100%	393,238,803	100%			
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	250,000,000	2 Aplikasi	267,500,000	2 Aplikasi	286,225,000	2 Aplikasi	306,260,750	2 Aplikasi	327,699,003	2 Aplikasi			
			Rincian: • Penyusunan Aplikasi Klinik Perumahan • Penyusunan																

			Aplikasi SIPARASU T PSU																
			Koordinas i dan Sinkronis asi Pengendal ian Pembang unan dan Pengemba ngan Perumaha n	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian perumahan	50 kali	50 kali	50,00 0,000	50 kali	53,500, 000	50 kali	57,2 45,0 00	50 kali	61,252,1 50	50 kali	65,539, 801	50 kali			
			Rincian: Pengawas an dan pengedali an perumaha n tanah kavling																
			Penerbit an Sertifikat Kepemili kan	Persencase tercapainya penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan	100%	100%	50,00 0,000	100%	53,500, 000	100%	57,2 45,0 00	100%	61,252,1 50	100%	65,539, 801	100%			

			Banguna n Gedung (SKGB)	gedung (SKGB)														
			Koordinas i dan Sinkronis asi Penerbita n Sertifikat Kepemilik an Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah gedung yang memiliki sertifikat bangunan gedung (SKGB)	20 sertifikat	20 sertifika t	50,00 0,000	20 sertifik at	53,500, 000	20 sertifik at	57,2 45,0 00	20 sertifik at	61,252,1 50	20 sertifikat	65,539, 801	20 sertifi kat		
			Rincian: Pembuata n sertifikat kepemilik an bangunan gedung															
			PROGRA M KAWASA N PERMUKI MAN	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani	100%	100%	3,805, 000,0 00	100%	4,071,3 50,000	100%	4,35 6,34 4,50 0	100%	4,661,28 8,615	100%	4,987,5 78,818	100%		

			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani	100%	100%	175,000,000	100%	187,250,000	100%	200,357,500	100%	214,382,525	100%	229,389,302	100%		
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi yang terpetakan kondisi kekumuhan	10 lokasi	10 lokasi	150,000,000	10 lokasi	160,500,000	10 lokasi	171,735,000	10 lokasi	183,756,450	10 lokasi	196,619,402	10 lokasi		
			Rincian: Pemetaan kekumuhan pada															

			kawasan permukiman																
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat terbina dalam lokasi kawasan kumuh	10 kelompok	10 kelompok	25,000,000	10 kelompok	26,750,000	10 kelompok	28,622,500	10 kelompok	30,626,075	10 kelompok	32,769,900	10 kelompok			
			Rincian: Pembinaan Kelompok																
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha	100%	100%	3,630,000,000	100%	3,884,100,000	100%	4,155,987,000	100%	4,446,906,090	100%	4,758,189,516	100%			

			10 (sepuluh) Ha															
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Site Plan dan DED peremajaan/pemugaran kumuh yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	107,000,000	1 Dokumen	114,490,000	1 Dokumen	122,504,300	1 Dokumen	131,079,601	1 Dokumen		
			Rincian:Penyusunan Dokumen Rencana Tapak dan DED peremajaan/Pemugaran Permukiman kumuh															

			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase tercapainya perbaikan rumah tidak layak huni	100%	100%	2,100,000,000	100%	2,247,000,000	100%	2,404,290,000	100%	2,572,590,300	100%	2,752,671,621	100%			
			Rincian: · Perbaikan RTLH · Penunjang Kegiatan Bedah Rumah RTLH · BOP Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)																
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang terbangun prasarana permukiman layak	1 RT	1 RT	245,000,000	1 RT	262,150,000	1 RT	280,500,500	1 RT	300,135,535	1 RT	321,145,022	1 RT			

			Beserta PSU															
			Rincian: · Pemban gunan Sarana Prasarana Permukim an di Lokasi Permukim an Kumuh															
			Koordinas i dan Sinkronis asi Pengendal ian Penyeleng garaan Pemugara n/Perema jaan Permukim an Kumuh	Jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur	1 kegiatan	1 kegiatan	75,00 0,000	1 kegiata n	80,250, 000	1 kegiata n	85,8 67,5 00	1 kegiata n	91,878,2 25	1 kegiatan	98,309, 701	1 kegiat an		

			Rincian: Biaya operasion al kegiatan pencegah an kumuh dan penangan an kumuh dari APBN yakni Program KOTAKU dan PISEW																
			Pelaksana an Pembang unan Pemugara n / Peremaja an Permukim an Kumuh	Terbangunnya prasarana permukiman yang sehat	100%	100%	1,110, 000,0 00	100%	1,187,7 00,000	100%	1,27 0,83 9,00 0	100%	1,359,79 7,730	100%	1,454,9 83,571	100%			
			· DAK Fisik Perumaha n dan Permukim an (APBN)																

			• Penunja ng DAK Bidang Perumaha n dan Permukim an																
			PROGRA M PENINGK ATAN PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan kualitas PSU	100%	100%	2,235, 000,0 00	100%	2,391,4 50,000	100%	2,55 8,85 1,50 0	100%	2,737,97 1,105	100%	2,929,6 29,082	100%			
			Urusan Penyeleng garaan PSU Perumaha n	Persentase penyelenggara n PSU perumahan yang terlaksana	100%	100%	2,235, 000,0 00	100%	2,391,4 50,000	100%	2,55 8,85 1,50 0	100%	2,737,97 1,105	100%	2,929,6 29,082	100%			
					2 Perumahan	2 Peruma han	1,660,	2 Perum ahan	1,776,2 00,000	2 Perum ahan	1,90 0,53	2 Perum ahan	2,033,57 1,380	2 Perumah an	2,175,9 21,377	2 Perum ahan			

			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang terfasilitasi			000,000			4,000								
			Rincian: Penyediaan/pemeliharaan Fasilitas PSU perumahan															
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Jumlah kegiatan sosialisasi Perda Perbub PSU	2 kali	2 kali	75,000,000	2 kali	80,250,000	2 kali	85,867,500	2 kali	91,878,225	2 kali	98,309,701	2 kali		

			Umum Perumahan															
			Rincian: Sosialisasi Perda Perbub PSU															
			Verifikasi Penyerahan PSU Permukiman dan Pengembangan	Jumlah PSU yang diserahkan ke pemerintah	60 PSU	60 PSU	500,000,000											
			Rincian Penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah															
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKET	Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan	2 Perkara	2 Perkara	40,000,000	2 Perkara	42,800,000	2 Perkara	45,796,000	2 Perkara	49,001,720	2 Perkara	52,431,840	2 Perkara		

			A TANAH GARAPAN															
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	100%	40,000,000	100%	42,800,000	100%	45,796,000	100%	49,001,720	100%	52,431,840	100%		
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pernah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	21,400,000	1 dokumen	22,898,000	1 dokumen	24,500,860	1 dokumen	26,215,920	1 dokumen		
			Rincian: Biaya Operasional pelaksanaan inventarisasi perkara															

			pertanahan															
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan	2 perkara	2 perkara	20,000,000	2 perkara	21,400,000	2 perkara	22,898,000	2 perkara	24,500,860	2 perkara	26,215,920	2 perkara		
			Rincian: Biaya Operasional penyelesaian sengketa tanah															
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	Persentase Redistribusi dan ganti rugi Tanah yang tercapai	100%	100%	20,000,000	100%	21,400,000	100%	22,898,000	100%	24,500,860	100%	26,215,920	100%		

			MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															
			Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah yang tercapai	100%	100%	20,000,000	100%	21,400,000	100%	22,898,000	100%	24,500,860	100%	26,215,920	100%		
			Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu)	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria	100%	100%	20,000,000	100%	21,400,000	100%	22,898,000	100%	24,500,860	100%	26,215,920	100%		

			kabupaten/kota															
			Rincian: Biaya Operasional Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah															
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah yang baik	100%	100%	50,000,000	100%	53,500,000	100%	57,245,000	100%	61,252,150	100%	65,539,801	100%		
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah	100%	100%	50,000,000	100%	53,500,000	100%	57,245,000	100%	61,252,150	100%	65,539,801	100%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah	100%	100%	50,000,000	100%	53,500,000	100%	57,245,000	100%	61,252,150	100%	65,539,801	100%		
			Rincian:Biaya Operasion															

			al Pelaksana an Koordinas i dan singkronis asi perencana an pengguna an tanah																
			PROGRA M PENYELE NGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUT AN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum layak jalan	100%	100%	5,745, 000,0 00	100%	6,147,1 50,000	100%	6,57 7,45 0,50 0	100%	7,037,87 2,035	100%	7,530,5 23,077	100%			
			Penetapa n Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupate n/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun	100%	100%	125,0 00,00 0	100%	133,75 0,000	100%	143, 112, 500	100%	153,130, 375	100%	163,84 9,501	100%			
			Penetapa n Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan	Persentase kegiatan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten	100%	100%	50,00 0,000	100%	53,500, 000	100%	57,2 45,0 00	100%	61,252,1 50	100%	65,539, 801	100%			

			LLAJ Kabupaten/Kota	yang ditetapkan														
			Rincian: Penganugerahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)															
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ yang tercapai	4 Rakor	4 Rakor	75,000,000	4 Rakor	80,250,000	4 Rakor	85,867,500	4 Rakor	91,878,225	4 Rakor	98,309,701	4 Rakor		
			Rincian: Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ															
			Penyediaan Perlengkapan	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	95%	95%	3,385,000,000	95%	3,621,950,000	95%	3,875,480	95%	4,146,770,555	95%	4,437,044,494	95%		

			Jalan di Jalan Kabupate n/Kota							6,50 0								
			Pembang unan Prasarana Jalan di Jalan Kabupate n/Kota	Persentase prasarana jalan yang terpasang dalam kota	90%	90%	200,0 00,00 0	90%	214,00 0,000	90%	228, 980, 000	90%	245,008, 600	90%	262,15 9,202	90%		
			Rincian: Penyediaa n Rambu Bersuar Flasher															
			Penyediaa n Perlengka pan Jalan di Jalan Kabupate n/Kota Rincian: Rambu tidak bersuar	Persentase perlengkapan jalan yang tersedia	90%	90%	300,0 00,00 0	90%	321,00 0,000	90%	343, 470, 000	90%	367,512, 900	90%	393,23 8,803	90%		
			Rehabilita si dan Pemelihara aan Prasarana Jalan	Persentase pemeliharaan prasarana jalan yang terpasang	100%	100%	150,0 00,00 0	100%	160,50 0,000	100%	171, 735, 000	100%	183,756, 450	100%	196,61 9,402	100%		
			Rincian: Rehabilita si/Pemeli															

			haraan Rambu Bersuar dan Tidak Bersuar															
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		100%	100%	2,735,000,000	100%	2,926,450,000	100%	3,131,301,500	100%	3,350,492,605	100%	3,585,027,087	100%		
			Rincian: Pemeliharaan alat penerangan jalan (PJU)															
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pengelolaan gedung terminal dengan baik	100%	100%	50,000,000	100%	53,500,000	100%	57,245,000	100%	61,252,150	100%	65,539,801	100%		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase terpeliharanya gedung terminal	2 Terminal	2 Terminal	50,000,000	2 Terminal	53,500,000	2 Terminal	57,245,000	2 Terminal	61,252,150	2 Terminal	65,539,801	2 Terminal		
			Rincian: Pemeliharaan gedung terminal															
					100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas			100,000,000		107,000,000		114,490,000		122,504,300		131,079,601				
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas	100%	100%	100,000,000	100%	107,000,000	100%	114,490,000	100%	122,504,300	100%	131,079,601	100%			

			Rincian: Rambu Tidak Bersuar(Marka Jalan)															
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi sopir Angkutan Umum, Duta Tetib Lalu Lintas	100%	100%	225,000,000	100%	240,750,000	100%	257,602,500	100%	275,634,675	100%	294,929,102	100%		
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi serta pembinaan angkutan jalan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	50,000,000	10 Kegiatan	53,500,000	10 Kegiatan	57,245,000	10 Kegiatan	61,252,150	10 Kegiatan	65,539,801	10 Kegiatan		

			Rincian: Sosialisasi Pengguna Angkutan Umum, Duta Tetib Lalu Lintas															
			Pengendal ian dan Pengawas an Ketersedi aan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupate n/Kota	Terselenggara nya Operasi PAM	100%	100%	175,0 00,00 0	100%	187,25 0,000	100%	200, 357, 500	100%	214,382, 525	100%	229,38 9,302	100%		
			Rincian: Pengaman an Lebaran Tahun Baru , Insidentil															
			Penerbit an Izin Penyelen ggaraan	Persentase penerbitan izin penyelenggar	100%	100%	1,000, 000,0 00	100%	1,070,0 00,000	100%	1,14 4,90	100%	1,225,04 3,000	100%	1,310,7 96,010	100%		

			dan Pembang unan Fasilitas Parkir	aan dan pembanguna n fasilitas parkir yang memadai						0,00 0								
			Fasilitas Pemenuh an Persyarat an Perolehan Izin Penyeleng garaan dan Pembang unan Fasilitas Parkir Kewenang an Kabupate n/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegr asi secara Elektronik	Persentase fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin peyelenggaraa n dan pembangunan fasilitas parkir	100%	100%	1,000, 000,0 00	100%	1,070,0 00,000	100%	1,14 4,90 0,00 0	100%	1,225,04 3,000	100%	1,310,7 96,010	100%		
			Rincian: Peningkat an pengelola an perparkir an															

			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	860,000,000	100%	920,200,000	100%	984,614,000	100%	1,053,536,980	100%	1,127,284,569	100%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	100%	100%	750,000,000	100%	802,500,000	100%	858,675,000	100%	918,782,250	100%	983,097,008	100%			
			Rincian:																
			Pengadaan layanan pengujian kendaraan bermotor (DRIVE THRU)		100%	100%	150,000,000	100%	160,500,000	100%	171,735,000	100%	183,756,450	100%	196,619,402	100%			
			Fasilitasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengadaan Kartu Uji, Pengadaan Printer Cetak Hasil Uji		200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	600,000,000	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	642,000,000	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	686,940,000	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	735,025,800	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	786,477,606	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji			

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	10 Sarpras	10 Sarpras	110,000,000	10 Sarpras	117,700,000	10 Sarpras	125,939,000	10 Sarpras	134,754,730	10 Sarpras	144,187,561	10 Sarpras			
			Rincian: Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor																
			TOTAL				24,090,452,477		25,776,784,150		27,581,159,041		29,511,840,174		31,577,668,986				

BAB VII
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program, Kegiatan, dan Sum Kegiatan pada Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan.

Penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. selama kurun waktu 2022-2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2026 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2026 ,serta keberhasilan mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman serta Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi”.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303